

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Fenomena sosial bagi anak merupakan sebuah peristiwa yang sudah umum dan dapat perhatian yang khusus bagi beberapa negara. ILO, terdapat kurang lebih 250 juta anak yang berusia 5 hingga 14 tahun sudah bekerja di negara Asia. Anak yang sudah bekerja pada waktu yang penuh sekitar 120 juta dan sisanya adalah anak – anak yang mendapat pendidikan Negara Asia adalah negarayang menyumbang angke bagi pekerja di bawah umur tertinggi di dunia

Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 1999 memperkirakan 7% atau 1.400.000 anak Indonesia yang berumur sekitar 10-14 tahun sudah bekerja. Selain itu data dari Departemen Pendidikan Nasional memperkirakan dari tahun 1995 hingga 1999, sebanyak 11.7 juta anak yang sudah tidak bersekolah. Menurut laporan resmi Badan Pusat Statistik 26% anak muda pada usia 15 – 17 tahun sudah terlibat dalam perebutan pekerjaan di tanah air sedangkan 55% masih bersekolah sebanyak 2.600.000 berusia 10 – 17 tahun sudah bekerja di berbagai sektor, jumlah tersebut mencapai 7 % dari total angkatan kerja di Indonesia.

Data yang di miliki oleh himpunan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada 1996 menemukan, anak anak berumur sekitar 10 – 14 sudah bekerja sekitar

4 jam perhari dan menjadi buruh di kota ataupun desa. Himpunan tersebut mempercayai bahwa angka tersebut sekitar 8,5 % dari keseluruhan anak-anak di Indonesia, namun jumlah tersebut tidak akurat dikarenakan banyaknya dokumen yang dipalsukan dan juga karena anak-anak yang berada umurnya di bawah 10 tahun tidak dicantumkan.

Indonesia menjadi negara yang terpilih berpartisipasi dalam perjanjian internasional untuk menghapus pekerja di bawah umur, dan menandatangani program dengan ILO pada tahun 1992 untuk memimpin kerja sama. Pemerintah dan ILO menandatangani perjanjian lain tentang pekerja di bawah umur yang berhubungan dengan perjanjian untuk mencapai tujuan kondisi yang berkemungkinan pemerintah dapat memberikan perlindungan bagi pekerja di bawah umur yang berada di negara Indonesia.

Menurut data ketenaga kerjaan pemerintah Indonesia, sebagian besar pekerja di bawah umur ini umumnya berada di sektor pertanian, adapun peningkatan pekerja anak meningkat dikarenakan perpindahan penduduk. Lembaga Sumber Manusia memperkirakan pada tahun 1998 sekiranya 1,92 juta anak sudah bekerja paruh waktu. Dengan data ini, sekitar 1,67 juta anak yang sudah bekerja di daerah pedesaan dan 249.000 bekerja di kota.

Berdasarkan perkiraan LSM, pekerja anak laki-laki jumlahnya melebihi pekerja anak perempuan di daerah pedesaan: 1,01 juta laki-laki dan 662.000 perempuan. Tetapi, di daerah perkotaan jumlah anak perempuan yang bekerja melebihi jumlah laki-laki: 119.402 laki-laki dan 130.000 perempuan. Banyaknya pembantu yang bekerja di rumah didominasi oleh perempuan yang

berumur di bawah 15 tahun. Meskipun jumlahnya tidak tersedia, di perkirakan anak – anak yang sudah bekerja hamper mencapai 1,6 juta. Peraturan tahun 1994 mengenai massa wajib belajar dari enam tahun samapai Sembilan tahun, Tetapi peraturan tersebut tidak mendukung dan tidak bekerja secara maksimal dikarenakan fasilitas yang tidak cukup dan kurangnya perekonomian bagi keluarga yang berakibat krisis ekonomi tersebut. Sekitarnya 8 juta anak – anak sudah putus sekolah dikarekana dimulainya krisis ekonomi yang dimulai pada tahun 1997. Beberapa kepala rumah tangga membeerikan pekerja bagi anak – anak di karenakan mudahnya di berikan arahan di banding dengan orang yang sudah tua.

Pekerja anak adalah seseorang yang bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Istilah pekerja anak sering diartikan sebagai pekerjaan yang dapat menghalangi masa kanak-kanak, potensi, martabat dan dapat mengancam perkembangan fisik dan mental anak yang bersangkutan. (ILO, n.d.). Sebuah pekerjaan akan berdampak bagi keberlangsungan sekolah mereka dan akan mengurangi kesempatan mereka untuk bersekolah, atau meminta mereka untuk mencoba menggabungkan kehadiran sekolah dengan pekerjaan yang terlalu lama dan berat. *ILO Minimum Age Convention No. 138* menyatakan bahwa usia di atas sekolah atau tidak kurang dari limabelas tahun adalah usia minimum bekerja. (ILO No. 138, 1973). Meskipun demikian, ada pula negara-negara yang konstitusinya secara tidak langsung memperbolehkan anak-anak berusia di bawah empatbelas tahun untuk bekerja layaknya orang dewasa, seperti di Pakistan, Sri Lanka, dan juga

India. Sehingga dapat mempengaruhi perkembangan anak atau mempengaruhi kehadiran anak di sekolah.

Jumlah pekerja anak di dunia pada tahun 2008 sekitar 215 juta kemudian angka tersebut turun cukup signifikan pada angka 168 juta di tahun 2012. Angka tersebut terdiri dari anak-anak yang berusia lima hingga tujuh belas tahun yang mana 115,3 juta di antara mereka bekerja di sektor berbahaya (*hazardous zone*). (*Child Labor Global Trends 2008-2012*, ILO. Hlm. 9). Dalam hal ini, Sektor berbahaya merupakan setiap aktivitas atau pekerjaan yang dapat berdampak negatif terhadap keselamatan, kesehatan fisik juga mental, serta perkembangan moral. Bahaya yang dimaksud dalam hal ini juga dapat berasal dari beban kerja yang diluar kemampuan anak seharusnya, kondisi fisik kerja, atau lamanya waktu kerja. Dari jumlah tersebut, sebanyak 150 juta pekerja anak berasal dari negara berkembang dengan rentang usia lima hingga empat belas tahun. (UNICEF, 2013).

Pekerja anak telah menjadi salah satu dari banyaknya masalah sosial strategis yang terjadi di masyarakat, hal ini disebabkan beberapa variabel seperti kemiskinan, norma sosial, dan yang paling utama adalah pendidikan. Mayoritas keluarga di negara berkembang dengan tingkat *child labour* yang tinggi berpenghasilan rendah dan membutuhkan penghasilan tambahan, oleh karena itu keadaan memaksa para orang tua untuk mempekerjakan anaknya demi membantu keluarga.

Tak tersedianya akses terhadap pendidikan layak dan terjangkau sangatlah menyulitkan orang tua. Pendidikan layak dan terjangkau sangatlah

dibutuhkan. Orang tua tak mampu untuk membiayai sekolah anak sekaligus memberi makan keluarga. Kondisi ini sangatlah memprihatinkan sehingga memaksa para orang tua untuk mempekerjakan anak-anak mereka demi membantu perekonomian keluarga.

Selanjutnya, hal lain yang memengaruhi tingginya tingkat pekerja anak adalah disebabkan oleh perbedaan status sosial. Sebagai contoh, didalam masyarakat dengan tingkat tekanan yang rendah, orang tua akan tetap membuat anaknya masuk ke sekolah dibanding dengan bekerja.

Beberapa faktor yang menyebabkan anak menjadi pekerja adalah faktor budaya, perubahan proses produksi, pendidikan, dan lemah peraturan perundang-undangan, serta faktor kemiskinan. Pekerjaan adalah satu-satunya cara untuk mereka memenuhi kebutuhan diri dan keluarga mereka. Terdapatnya diskriminasi terhadap jenis kelamin, ras, and agama turut berperan dalam menyebabkan maraknya terjadi kasus pekerja anak di seluruh dunia. Orang dewasa mempekerjakan anak-anak karena mereka dianggap lebih mudah diiming-imingi juga lebih mudah untuk direkrut.

Pendidikan adalah pilihan bagi anak pekerja. Sebagai akibat dari kemiskinan, mereka tidak dapat bersekolah karena sudah terbagi waktu untuk sekolah dan bekerja. Urutan ini menjadikan mereka "berketerampilan rendah," yang tidak lepas dari kemiskinan karena mereka hanya mampu melakukan pekerjaan dengan tingkat rendah atau pekerjaan kasar. Lingkaran ini tidak pernah putus karena keterbatasan kemampuan mereka untuk melakukan

pekerjaan lain dan keterbatasan mereka dalam mengakses informasi untuk mencapai kehidupan yang lebih layak.

Meski ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5% per tahun dari tahun 2000 (pasca krisis), masih ada kekhawatiran bahwa tingkat pengangguran akan tetap meningkat. Pemerintah sendiri telah berkomitmen dan mengupayakan untuk mengurangi angka pengangguran sekitar 10% di tahun 2009. Selain itu, target ini ada hubungannya dengan tujuan pengurangan kemiskinan yang lebih luas secara berkelanjutan. Selain isu-isu ketenagakerjaan, fokus lain dari pemerintah Indonesia dan ILO juga adalah mengenai kondisi pekerjaan beserta administrasi ketenagakerjaan yang efisien. ILO sangatlah memperhatikan prioritas-prioritas yang dimiliki oleh pemerintah seperti:

- a) Menghentikan eksploitasi di tempat kerja.
- b) Penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan memulihkan mata pencaharian, khususnya bagi kaum muda.
- c) Dialog sosial untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Prioritas-prioritas yang telah disebutkan di atas diidentifikasi oleh ILO di Indonesia melalui *National Programme for Decent Works*.

International Labor Organization adalah sebuah institusi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang selalu berupaya untuk mendorong terciptanya peluang yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak, meningkatkan produktivitas, dan juga meningkatkan keamanan dan keadilan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. ILO sendiri memiliki utjuan untuk memasarkan hak yang di

dapat selama bekerja, mempromosikan peluang pekerjaan yang layak, memajukan perlindungan dan memperkuat gagasan dalam dunia kerja. (ILO, 2007)

ILO beroperasi di bawah Dewan Eksekutif ILO (badan pengatur), yang terdiri dari 28 perwakilan pemerintah, 14 perwakilan pekerja dan 14 perwakilan pengusaha. Mereka bertanggung jawab untuk membuat berbagai keputusan tentang tindakan-tindakan yang nantinya akan mempengaruhi kebijakan ILO, menyiapkan berbagai rencana program dan rancangan anggaran, yang kemudian menyerahkannya ke *International Labour Conference* (ILC) guna diadopsi dan dipilih oleh *General Assembly*. ILC melakukan pertemuan setahun sekali pada bulan Juni di Jenewa, Swiss. Delegasi dari tiap-tiap negara didampingi oleh seorang penasehat teknis. Setiap negara anggota atau *State Party*, memiliki hak untuk mengirimkan empat delegasi ke pertemuan ILC, yang mana dua delegasi berasal dari pemerintah, satu delegasi dari serikat pekerja, dan satu delegasi dari pihak pengusaha, yang masing-masing delegasi memiliki hak untuk mengemukakan pendapat serta memiliki otonomi dalam hak pilihnya.

ILO didasari oleh pentingnya peran dan sinergi di antara pemerintah, perusahaan atau korporasi, dan serikat buruh di dalam membina kemajuan sosial dan perekonomian suatu negara. Diskusi di antara pemerintah dan dua orang delegasi ‘mitra sosial’ dalam mempromosikan ‘*citizen building*’ di dalam dunia kerja guna membangun peradaban yang adil dan Makmur.

ILO adalah organisasi yang mempertemukan perwakilan antara pemerintah yang bersangkutan, perusahaan dan pekerja untuk membentuk

standar, aturan, dan program ketenaga kerjaan. Dialog-dialog sosial berarti konsultasi dan negosiasi, dapat juga berupa pertukaran informasi dari para perwakilan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

ILO berupaya meminimalkan masalah hubungan industrial yang sering terjadi di Indonesia dan negara anggota lainnya melalui pertemuan 185 pemerintah, organisasi di seluruh dunia mendeklarasikan dan juga berupaya menjadikan pekerjaan yang sangat layak bagi seseorang pengertian peranan. (ILO, 2015)

Pekerja sangat penting untuk memiliki kesejahteraan manusianya. Selain mendapatkan penghasilan, pekerja juga dapat meningkatkan ekonomi bagi keluarga, lingkungan, dan dirinya sendiri. Tetapi tetap bergantung kepada sebuah pekerjaan yang cocok.

Pekerjaan yang layak merupakan hasil dari kepribadian yang baik juga status sosial. Ini membutuhkan kesempatan dan perlakuan yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki. Pekerjaan yang layak juga merupakan kunci untuk mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, penciptaan lapangan pekerjaan harus dibuat dengan secara layak dan dibuat dalam sebuah kebijakan pembangunan.

Perkembangan jumlah anak dan perempuan telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Karena luasnya negara, perbedaan ini terlihat jelas dengan jumlah anak – anaknya. Penduduk Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke sekitar 5000 Km. Oleh hal ini, sangat penting untuk mencapai hak bagi anak – anak Indonesia.

Peluang ekonomi secara keseluruhan bagi anak – anak sangat baik. Indonesia telah melihat sebuah keuntungan dalam bidang ekonomi sekitar 4 – 10 persennya selama beberapa tahun. Penurunan dalam tingkat kelahiran dan kematian menunjukkan bahwa perbedaan geografis antara kelahiran dan kematian akan mengalami penurunan pada tahun 2030.

Namun, perkembangan ekonomi ini juga harus diikuti peningkatan kesenjangan dan perpindahan penduduk. Sekitar 53 persennya dari total penduduk saat ini bertempat tinggal di daerah perkotaan. Angka kemiskinan yang juga tinggi pada setiap tahunnya berdampak bagi anak - anak. Jumlah ini kemungkinan akan meningkat karena perubahan iklim dan juga hal lainnya.

Untuk mengatasi perkembangan jumlah pekerja anak di indonesia. Penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul **“PERAN ILO DALAM MENGATASI PEKERJA ANAK DI INDONESIA”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dengan paparan latar belakang diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan pertanyaan sebagai berikut :

- 1) Mengapa pemerintah Indonesia tidak dapat menangani jumlah pekerja anak yang semakin meningkat dan tereksplorasi?
- 2) Bagaimana respon Organisasi Buruh Internasional (ILO) dalam melihat pekerja anak di Indonesia?

- 3) Bagaimana program Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan pemerintah Indonesia dalam mengurangi angka pekerja anak di Indonesia?

### **1.2.1 Pembatasan Masalah**

Dikarekan luasnya permasalahan mengenai pekerja di bawah umur di Indonesia, penulis membatasi masalah yang akan diteliti yakni hanya mengenai Implementasi ILO dapat mengurangi eksploitasi pekerja di bawah umur di Indonesia sepanjang tahun 2016 – 2019.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dapat diajukan guna mempermudah proses analisis terkait permasalahan yang sedang diteliti. Untuk menjawab identifikasi masalah di atas, maka dapat diperoleh pertanyaan penelitian yakni:

**“Sejauh mana International Labour Organization (ILO) mengimplementasikan program-programnya dalam mengurangi eksploitasi pekerja anak di Indonesia?”**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis memiliki sebuah tujuan yang bersifat khusus dan umum yang berhubungan dengan penelitian ini, pemahaman dalam mengembangkan program-program yang sedang diteliti. Berikut ini adalah urutan sebuah tujuan penelitian yang berhubungan dengan judul yang diambil:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Upaya Organisasi Buruh Internasional (ILO) dapat mengurangi pekerja anak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan Organisasi Buruh Internasional (ILO) dapat menciptakan stabilitas pekerja anak di Indonesia.
3. Untuk mengetahui Kerjasama Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan Pemerintah Indonesia dapat mengurangi pekerja dibawah umur di Indonesia.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Selain dari Tujuan Penelitian diatas, analisis ini juga dapat diharapkan berguna bagi:

1. Sebuah pertimbangan pada program studi Hubungan Internasional dan juga menambah pengetahuan mengenai Organisasi Internasional.
2. Dapat memberikan pengetahuan yang bersifat ilmiah bagi program studi Hubungan Internasional serta memberikan referensi

kepada penulis – penulis yang akan mengambil judul atau pembahasan mengenai Pekerja Anak di Indone

